



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI KUDUS

Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus - Jawa Tengah

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H.

NIP : 19670831 199603 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kudus

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum

NIP : 19530324 198203 2 003

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 2 Januari 2020

Pihak Kedua

DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum
NIP. 19530324 198203 2 003



Pihak Pertama

RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H.
NIP. 19670831 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus ujian dinas	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%

		d. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%
		e. Persentase baperjakat yang diselesaikan	100%
		f. Persentase penyelesaian : - Usulan pengangkatan PNS - Kenaikan pangkat - Kenaikan gaji berkala - Usulan pengangkatan jabatan - Pemberhentian dan pensiun - Pengelolaan sasaran kerja pegawai - Pengelolaan Pajak	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
		g. Presentase pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran	100%
		h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui teknologi informasi, kategori : - Wajib diumumkan secara berkala - Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses	100% 100%
6.	Peningkatan Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%
		b. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan hibah	100%
		c. Pengelolaan barang milik negara	100%
		d. Pelaporan keuangan dan verifikasi	100%

1. **DIPA 01** sebesar Rp. 6.437.924.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
2. **DIPA 03** sebesar Rp. 109.400.000,- (seratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Kudus, 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS

DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum
NIP. 19530324 198203 2 003



RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H.
NIP. 19670831 199603 1 001